KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dana BOS bermasalah administratif ratusan kepsek di Sulsel mundur
Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Dana BOS Bermasalah Administratif Ratusan Kepsek Di Sulsel Mundur

Sebanyak 326 kepala sekolah (kepsek) di Sulawesi Selatan (Sulsel) tiba-tiba mundur secara bersamaan. Peristiwa ini muncul setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dinilai bermasalah secara administratif.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap kepsek berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi lembaga terkait, termasuk BPK dan Inspektorat. Menurutnya, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran harus melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dari sini kemudian muncul peristiwa mundur massal para kepsek. Namun, ia menegaskan, tidak semua temuan BPK itu otomatis berujung pada proses hukum.

"Sejauh ini tidak ada indikasi penggelapan dana BOS. Istilah penggelapan baru bisa digunakan jika ada hasil pemeriksaan berkekuatan hukum yang menyatakan hal tersebut. Kalau sudah mengarah ke proses hukum, itu bukan ranah dan kewenangan saya. Yang jelas, kami mengikuti aturan serta kebijakan yang berlaku," kata Iqbal.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, fenomena mundurnya 326 kepsek di Sulsel usai temuan BPK perlu dicermati secara serius. Apalagi, BPK mendapati adanya pengelolaan keuangan, seperti dana BOS yang bermasalah.

"Kami memandang bahwa mundurnya kepala sekolah di Sulawesi Selatan merupakan persoalan yang perlu dicermati secara serius dan proporsional," ujar pria yang akrab disapa Ari ini.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyayangkan adanya fenomena mundur massal para kepsek ini. Dia khawatir, fenomena ini bakal berdampak buruk bagi dunia pendidikan sehingga harus dievaluasi.

Sementara itu, Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, mundur massal dari jabatan kepsek merupakan pilihan yang rasional. Sebab, jika tidak mundur, mereka berpotensi terlilit perkara hukum.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Ubaid Matraji dan Hetifah Sjaifudian terkait fenomena mundur massal para kepsek di Sulsel, berikut wawancaranya.

HETIFAH SJAIFUDIAN, Ketua Komisi X DPR

Bisa Berdampak Buruk Bagi Dunia Pendidikan



> **Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem tata kelola pendidikan, khususnya terkait beban administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah.**

Ratusan kepsek di Sulsel secara massal mengundurkan diri dari jabatannya. Apa tanggapan Anda atas fenomena ini?

Pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem tata kelola pendidikan, khususnya terkait beban administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah.

Berarti harus segera ditangani dengan cepat?

Jika tidak segera ditangani, pengunduran diri dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam kepemimpinan sekolah yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan layanan pendidikan.

Apa dampaknya bagi operasional sekolah jika terus dibiarkan?

Terkait dampak terhadap operasional sekolah, Pemerintah Daerah perlu memastikan adanya mekanisme transisi dan penunjukan pelaksana tugas yang berjalan baik agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.

Pengunduran diri massal ini dikaitkan dengan dana BOS. Apa respons Anda?

Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita akan perlunya evaluasi tata kelola dana BOS. Prinsip akuntabilitas harus tetap ditegakkan, namun sistem pengelolaannya juga perlu dibuat lebih sederhana, mudah dipahami dan didukung pendampingan yang memadai agar tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan bagi kepala sekolah.

Sebagai pimpinan Komisi X DPR, apa yang akan Anda lakukan ke depannya?

Kami selalu mendorong dalam setiap rapat kerja dengan Pemerintah maupun kepada Pemerintah Daerah pada setiap kunjungan kerja ke daerah agar melakukan pemetaan akar persoalan, memperkuat kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah, serta meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Langkah-langkah ini penting agar para kepala sekolah mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel, sekaligus tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi peserta didik. ■ REN

UBAID MATRAJI, Kornas JPPI

Jadi Alarm Keras Bagi Tata Kelola Pendidikan



> **Mundur massal adalah pilihan rasional terakhir untuk menyelamatkan diri, harga diri, dan keluarga mereka dari jeratan hukum akibat ulah para oknum.**

Apa pendapat Anda mengenai peristiwa mundurnya ratusan kepsek di Sulsel?

Mundurnya kepala sekolah secara massal adalah alarm keras bagi tata kelola pendidikan kita. Jabatan kepala sekolah yang seharusnya berfokus pada peningkatan mutu akademik dan kepemimpinan instruksional kini berubah menjadi jabatan yang penuh risiko administratif dan rentan terhadap intervensi. Ini merupakan bentuk "protes diam" karena mereka merasa tidak lagi memiliki ekosistem kerja yang aman dan profesional.

Menurut Anda, apa masalahnya?

Ada persoalan mengenai beban administratif versus kompetensi keuangan. Kepala sekolah dipilih karena kompetensi pedagogik dan kepemimpinan. Namun, begitu menjabat, mereka dipaksa menjadi akuntan publik yang harus mengurus laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) keuangan yang sangat rumit.

Belanja satuan pendidikan wajib dialihkan sepenuhnya ke sistem digital melalui SiPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), tidak boleh lagi dilakukan secara manual. Jika belanja masih dilakukan secara manual (nota fisik, kuitansi manual, mencari vendor sendiri), peluang main mata, mark-up, atau kesalahan administratif menjadi sangat besar.

Berarti kepala sekolah harus teliti, khususnya dalam pengeluaran sekolah, ya?

Iya, rekam jejak digital transaksi langsung tercatat dengan rapi, transparan, dan terintegrasi dengan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Ketika sekolah melakukan pengadaan barang/jasa atau menerima dana hibah/bantuan sosial tertentu, kerap kali ada "pintu belakang" yang meminta jatah *cashback*. Lebih parah lagi, jika intervensi itu datang dari oknum birokrasi di atasnya yang meminta "setoran rutin" atau mengarahkan agar belanja sekolah dilakukan kepada vendor tertentu yang harganya sudah di-*mark-up*.

Jika mereka menolak permintaan cashback atau setoran, mereka akan dipersulit secara birokrasi, diancam dimutasi ke daerah terpencil, atau terus-menerus dicari kesalahannya hingga tidak tenang bekerja. ■ REN